



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
17. Bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah bantuan

- sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar kepada individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, tekanan psikis, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lebak.

#### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

#### Pasal 4

- (1) Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial terdiri dari :
  - a. Pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan fungsi ordonasi
- (2) Dalam melaksanakan fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Organisasi Perangkat Daerah melakukan tugas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta monitoring dalam pengelolaan belanja hibah dan/atau bantuan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi ordonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas persetujuan Bupati dalam rangka pelaksanaan fungsi otorisasi.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
  - a. Pendidikan, kebudayaan dan adat istiadat, dan kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Perumahan dan permukiman serta pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  - e. Perencanaan pembangunan dan litbang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- g. Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Lingkungan hidup dan kebersihan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP2A);
- k. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
- l. Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- m. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- n. Koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Kepemudaan dan olahraga non profesional dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
- r. Perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- s. Pertanian, perkebunan dan penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- t. Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
- u. Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
- v. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta pertahanan keamanan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Perindustrian dan perdagangan serta energi

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- x. Keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

### BAB III

#### HIBAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.



- (8) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

#### Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Lebak yang kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa tidak dibiayai dari APBN.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu;
    1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
    2. Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka);
    3. Komisi Penanggulangan Aids Indonesia (KPAI);
    4. Komisi Perlindungan Anak;
    5. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
    6. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
    7. Palang Merah Indonesia (PMI);
    8. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
    9. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);
    10. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
    11. Badan Amil Zakat Nasional;
    12. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
    13. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
    14. Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP);
    15. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lebak;
    16. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
    17. Badan dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; yaitu :

1. Lembaga swadaya masyarakat; atau
  2. Badan dan Lembaga yang memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, yaitu:
1. Kelompok tani/gabungan tani sejenis;
  2. Kelompok Nelayan/gabungan kelompok nelayan atau sejenis;
  3. Kelompok pembudidaya ikan atau sejenisnya;
  4. Karang taruna;
  5. Pengurus/kepanitiaan rumah ibadah;
  6. Organisasi Kedaerahan;
  7. Organisasi seni/budaya;
  8. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengertian Penerima Hibah Bansos tidak dapat menerima hibah secara terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (8) huruf b, dikecualikan kepada organisasi sebagai berikut :
- a. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI);
  - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

- c. Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP);
- d. Gerakan PRAMUKA;
- e. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- f. Komisi Penanggulangan AIDS (KPAIDS);
- g. Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
- h. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- i. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- j. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA);
- k. Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP);
- l. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmaliyah (FKMDT);
- m. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Padat Karya di Kelurahan;
- n. Organisasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga pada Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten Lebak;
  - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
  - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lebak; dan
  - d. Tidak terjadi konflik internal.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Kabupaten Lebak;

- c. Memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Lebak; dan
- d. Tidak terjadi konflik internal.

## Bagian Kedua

### Perencanaan dan Penganggaran

#### Pasal 9

- (1) Usulan hibah diajukan secara tertulis kepada bupati dengan dilengkapi proposal paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun perencanaan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakan-nya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
  - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah;
  - c. Susunan kepengurusan, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus calon penerima hibah;
  - d. Domisili sekretariat, diperuntukkan untuk hibah kepada Badan, lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan, berisi tentang keberadaan/alamat calon penerima hibah;
  - e. Bentuk kegiatan dan kebutuhan anggaran, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang;
  - f. Jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah;
  - g. Jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah apabila hibah yang diajukan berupa uang;

- h. Tanda tangan dan nama lengkap pimpinan/ketua calon penerima hibah/penerima kuasa bagi permohonan hibah yang diajukan oleh kantor perwakilan/cabang/ranting badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta stempel/cap pengusul hibah.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. Surat pernyataan permohonan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Surat pernyataan tidak pernah mendapatkan hibah secara terus menerus, kecuali untuk badan/ lembaga/organisasi yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dengan format sebagaimana tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Fotocopy dokumen pendirian/pembentukan/Surat Keterangan Terdaftar/Surat Penetapan/pengesahan status badan hukum calon penerima hibah yang masih berlaku.
  - e. Fotocopy penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi, Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi.

## Pasal 10

### Evaluasi Permohonan

- (1) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait dalam melaksanakan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dibantu oleh Tim evaluasi Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota paling banyak 3 orang.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2), sekurang kurangnya melakukan evaluasi sebagai berikut:
  - a. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi pemohon hibah;
  - b. Melakukan survey lokasi pemohon hibah; dan
  - c. Memberikan kajian secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait atas kelayakan besaran uang, jenis barang/jasa yang akan dihibahkan.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim dapat dibantu oleh tenaga ahli PNS atau swasta.

### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan survey lokasi pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, tim evaluasi dapat dibantu oleh Tim Survey yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang permohonannya dinyatakan lengkap menjadi dasar rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah paling lambat

minggu keempat bulan April pada tahun perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2 dan 3), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bahan pertimbangan.

#### Pasal 12

- (1) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah yang dituangkan dalam Nota Pertimbangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun perencanaan.
- (2) Nota Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pencantuman besaran belanja hibah dalam Rancangan KUA-PPAS untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD atau KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

#### Pasal 14



- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja dan rincian obyek belanja hibah berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan rincian obyek belanja hibah barang berkenaan pada Perangkat Daerah.
- (4) Rincian obyek belanja hibah barang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat;
  - b. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga.

#### Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.
- (3) Berdasarkan DPA-PPKD Tim Evaluasi Perangkat Daerah melakukan evaluasi tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang penerima Hibah.
- (4) Keputusan Bupati tentang penerima hibah, memuat tentang nama penerima hibah dan jumlah uang yang akan diterima untuk hibah uang, sedangkan untuk hibah barang memuat nama penerima hibah, nama barang atau jasa yang akan diterima dan nilai uang dari barang dan jasa yang akan diterima
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Bupati dengan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran uang/barang yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;

- f. Tata cara pelaporan hibah;
  - g. Tidak dalam duplikasi anggaran yang sama;
  - h. Sisa dana; dan
  - i. Pertanggungjawaban dengan segala akibat hukumnya bagi penerima hibah apabila memenuhi unsur penyimpangan/pemalsuan/penipuan terhadap dokumen persyaratan administrasi.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. Proposal Penganggaran Hibah;
  - b. Surat Rekomendasi Penganggaran;
  - c. Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Hibah;
  - d. Surat Pernyataan kegiatan yang bersumber dana hibah belum dilaksanakan;
  - e. Fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - f. Pakta Integritas dari penerima hibah sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pemberian Hibah berupa uang dengan nilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pemberian Hibah berupa barang atau jasa, NPHD ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahannya.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah

kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

- (4) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

## Paragraf 2

### Penatausahaan

#### Pasal 19

- (1) Calon penerima hibah dalam bentuk uang mengajukan surat permohonan penyaluran hibah uang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah penanggungjawab, berdasarkan Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani bupati atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani NPHD dengan penerima hibah.
- (2) Surat permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi untuk hibah uang dan tanda terima untuk hibah barang yang telah ditandatangani diatas materai secukupnya.
- (3) Dalam hal dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan penerima hibah, Perangkat Daerah Penanggungjawab menyampaikan surat rekomendasi penyaluran hibah kepada PPKD.
- (4) Surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. Surat permohonan penyaluran hibah dari calon penerima hibah;
  - b. Surat Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah;
  - c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
  - d. Kwitansi yang telah ditandatangani diatas materai.
- (5) Berdasarkan surat rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara PPKD, bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

- (6) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan kepada PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (8) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Penerima; atau
  - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD bagi penerima Hibah dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (10) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran hibah dapat diterima langsung kepada penerima yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Penerima Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Hibah Barang atau Jasa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menganggarkan belanja hibah dimaksud.
- (2) Surat Permohonan Penyaluran Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa dilengkapi dengan Dokumen NPHD.
- (3) Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang atau Jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilengkapi

Berita Acara Penyerahan Hibah dan alat bukti sah lainnya.

Pasal 21

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka belanja hibah dalam bentuk barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teknis penyampaiannya dibawah koordinasi Perangkat Daerah penanggungjawab.
- (3) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - b. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan;
  - c. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
  - d. Tanda tangan dan nama lengkap penerima serta stempel penerima hibah; dan
  - e. Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Penerima Hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (5) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. Penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan

- kepada pemerintah daerah dan NPHD;
- b. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah; dan
  - c. Lampiran lain yang dibutuhkan, seperti Berita Acara Penyerahan Hibah berupa barang.

#### Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab.

#### Pasal 24

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 25

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
  - a. Laporan penggunaan Hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima

barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah penanggungjawab berkewajiban memberikan teguran.
- (6) Format Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 27

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

### BANTUAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu



## Umum

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas atau manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
- (4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Individu atau keluarga yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Individu yang berprestasi dibidang pendidikan, olahraga, agama dan kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan KUA PPAS dan perubahannya,
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan KUA PPAS dan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Selektif;
  - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari

kemungkinan resiko sosial.

- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. Memiliki identitas sebagai penduduk Kabupaten Lebak;  
dan
  - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Lebak.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi :
  - a. Rehabilitasi sosial;
  - b. Perlindungan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial;
  - d. Jaminan sosial;
  - e. Penanggulangan kemiskinan;
  - f. Penanggulangan bencana; dan
  - g. Pemberian penghargaan kepada individu yang berprestasi.

#### Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan anggota masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan

menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial anggota masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan anggota masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap anggota masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (7) Pemberian penghargaan kepada individu yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (6) huruf g ditujukan bagi anggota masyarakat yang berprestasi dibidang pendidikan, olahraga, agama dan kebudayaan sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat miskin;
  - b. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat cacat fisik permanen;

- c. Pemberian bantuan biaya pengobatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu;
  - d. Pemberian bantuan operasional sekolah bagi anak miskin;
  - e. Pemberian bantuan santunan untuk korban kebakaran, korban sengatan listrik bagi keluarga miskin; dan
  - f. Pemberian bantuan kepada korban bencana akibat alam lainnya.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (4) Khusus untuk pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan diberikan kepada individu/keluarga dalam bentuk uang.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dianggarkan berdasarkan usulan tertulis dari:
- a. Anggota masyarakat; atau
  - b. Pemerintah Desa/Kelurahan mengetahui camat.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui Dinas Teknis yang mengelola bantuan sosial.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Rencana peruntukan dan biaya yang dibutuhkan atau besaran bantuan sosial yang dimohon untuk permohonan bantuan sosial berupa uang; atau
  - b. Jenis dan jumlah barang yang dimohon untuk permohonan bantuan sosial berupa barang.
- (4) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri foto copy dengan kartu tanda penduduk atau

foto copy kartu keluarga atau dokumen pendukung lainnya.

- (5) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dengan daftar calon penerima bantuan sosial.
- (6) Lampiran daftar calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat Nama, Alamat, Besaran Uang atau Jenis Barang.
- (7) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Penanggungjawab untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 35

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rancangan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pencantuman rencana alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan bersama yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembahasan KUA/PPAS APBD dan/atau KUA/PPAS Perubahan APBD.
- (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi satu kesatuan dengan nota kesepakatan KUA/PPAS APBD dan/atau nota kesepakatan KUA/PPAS Perubahan APBD antara Bupati dengan DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 37

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD beserta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD beserta perubahannya.
- (3) Berdasarkan DPA-PPKD Tim Evaluasi Perangkat Daerah melakukan evaluasi tahap II, hasil evaluasi sebagai dasar penerbitan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial, memuat tentang nama penerima, alamat dan jumlah uang yang akan diterima untuk bantuan sosial berupa uang, sedangkan untuk bantuan sosial berupa barang, memuat nama penerima, alamat, nama barang yang akan diterima dan nilai uang dari barang yang akan diterima.

#### Pasal 39

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada

individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).

- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Dinas Sosial serta telah mendapat persetujuan kepala daerah.
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab dan diajukan kepada PPKD terkait ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana Ayat (4) PPKD dapat menyalurkan dana yang dimohon dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memberikan uang panjar sebesar 10% dari total anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial;
  - b. Memberikan penyaluran kembali minimal setelah 50% uang panjarnya terealisasi, dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Penatausahaan

#### Pasal 40

- (1) Calon penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Dalam hal surat permohonan penyaluran telah lengkap dan sah, Perangkat Daerah Penanggungjawab menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada



PPKD.

- (3) Surat rekomendasi pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. Surat permohonan penyaluran dari calon penerima hibah; dan
  - b. Surat keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial untuk bantuan sosial yang direncanakan atau surat persetujuan bupati untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (4) Dalam hal ketentuan surat rekomendasi penyaluran telah lengkap dan sah bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
- (5) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (7) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya disampaikan ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (8) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pemindahbukuan dari RKUD ke Penerima; dan
  - b. Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa, selanjutnya Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberi kuasa menyalurkan kepada penerima.
- (9) Dalam hal-hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dapat diterima langsung kepada penerima yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.

#### Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi penggunaan dana.
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

#### Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang

dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Penanggungjawab.

#### Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu, keluarga, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
  - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Penanggungjawab 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Penanggungjawab.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Memastikan bahwa hibah atau bantuan sosial berupa uang/barang diterima oleh penerima hibah atau bantuan sosial sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah/bantuan sosial;
  - b. Memberikan surat peringatan/teguran kepada penerima hibah/bantuan sosial apabila sampai dengan

- batas waktu yang ditetapkan penerima hibah/bantuan sosial belum menyerahkan laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;
- c. Menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana hibah/bantuan sosial dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana hibah/bantuan sosial yang diterima lebih besar dari jumlah dana hibah/bantuan sosial yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Format surat pernyataan telah menerima hibah/ bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinyatakan dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 6 Januari 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Lebak  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 2



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

<b>CONTOH</b>
---------------

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka permohonan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar membutuhkan dana hibah sesuai dengan proposal yang kami ajukan. Apabila permohonan organisasi/lembaga kami disetujui, saya akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, 6 Januari 2017

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

<b>CONTOH</b>
---------------

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDAPATKAN HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Tahun Anggaran ..... (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak pada tahun anggaran ..... (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lebak, maka kami bersedia untuk mengembalikan uang hibah yang telah kami terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, 6 Januari 2017

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

## B. HIBAH BERUPA BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No. Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Tahun Anggaran ..... (diisi tahun berkenaan/berjalan), dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami tidak pernah mendapatkan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak pada tahun anggaran ..... (diisi tahun sebelumnya). Apabila ditemukan bukti bahwa organisasi/lembaga kami pernah menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lebak, maka kami bersedia untuk mengembalikan barang yang telah kami terima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**CONTOH**

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebak, .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lebak, .....  
Pemohon hibah  
Materai/ttd  
(Nama lengkap)

## B. HIBAH BERUPA BARANG

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lebak, .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG   PROSEDUR   DAN   TATA   CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, .....  
Pemohon hibah  
Materai/ttd  
(Nama lengkap)

## B. HIBAH BERUPA BARANG

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lebak, .....

Pemohon bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)



## B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

### PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Lebak, .....

Pemohon bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, .....  
Pemohon bantuan sosial  
Materai/ttd  
(Nama lengkap)

## B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lebak, .....

Pemohon bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA

A. HIBAH BERUPA UANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan hibah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun ..... sebesar..... Dan akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, .....  
Pemohon Hibah  
Materai/ttd  
(Nama lengkap)

## B. HIBAH BERUPA BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan hibah yang kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi/lembaga kami benar-benar telah menerima hibah barang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun ..... berupa ..... Dan akan menggunakan barang hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan hibah barang tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah barang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, .....

Pemohon hibah

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

**CONTOH**

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang saya/kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya/kami benar benar telah menerima dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun..... sebesar..... Dan akan menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan usulan bantuan sosial dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, .....

Pemohon bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

## B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
No. Identitas KTP :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bertindak untuk dan atas nama :

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang saya/kami ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan ini menyatakan bahwa saya/kami benar benar telah menerima bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun..... dalam bentuk barang berupa ..... dan akan menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan bantuan sosial yang diajukan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat Laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang tersebut dan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sosial berupa barang dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Lebak, .....

Pemohon bantuan sosial

Materai/ttd

(Nama lengkap)

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA  
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KOP PERANGKAT DAERAH

Rangkasbitung, .....

Nomor : Kepada,  
Sifat : Penting Yth. BUPATI LEBAK  
Lampiran : -  
Hal : REKOMENDASI Melalui  
Kepala Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah  
di -  
Rangkasbitung

Membaca proposal yang diajukan oleh ..... melalui surat Nomor :.....

.....tanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

- |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1. Kelengkapan Administrasi                         | <input type="checkbox"/> Lengkap | <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap |
| 2. Domisili   | <input type="checkbox"/> Jelas   | <input type="checkbox"/> Tidak Jelas   |
| 3. Keberadaan Organisasi                            | <input type="checkbox"/> Fiktif  | <input type="checkbox"/> Tidak Fiktif  |
| 4. Nilai yang diajukan                              | <input type="checkbox"/> Wajar   | <input type="checkbox"/> Tidak Wajar   |
| 5. Organisasi terdaftar di Pemda                    | <input type="checkbox"/> Ya      | <input type="checkbox"/> Tidak         |
| 6. Pengelompokan penerima hibah:                    |                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Kelompok Orang             |                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Kemasyarakatan  |                                  |  |
| <input type="checkbox"/> Organisasi Semi Pemerintah |                                  |  |

Catatan :  
.....  
.....  
.....



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/ tidak dapat\*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD.....

Nama

NIP.

Catatan :

☐ Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA